

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENGADILI SENGKETA PROSES DAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF**

TESIS



OLEH;

MOH. SALEH

1321900017

**PRODI STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

TESIS
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENGADILI SENGKETA PROSES DAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF

Diajukan oleh:

MOH. SALEH
1321900017

Telah disetujui pembimbing untuk diujikan:

Surabaya, 04 Januari 2022

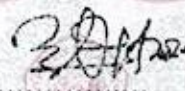
Dr. HUFRON, S.H., M.H

Pembimbing I



Dr. SYOFYAN HADI, S.H., M.H

Pembimbing II



TESIS
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENGADILI SENGKETA PROSES DAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF

Diajukan oleh:

MOH. SALEH

1321900017

Telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan lulus pada ujian tesis Program
Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal: 06 Januari 2022

Tim Penguji

Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,H.Hum

Ketua

Dr. Hufron, S.H.,M.H

Anggota

Dr. Tomy Michael, S.H.,MH

Anggota

Mengesahkan;

Fakultas Hukum

17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : MOH. SALEH

NIM : 1321900017

Program : Magister Hukum
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan judul :
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGADILI SENGKETA PROSES DAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 04 Januari 2022



Hormat Saya

MOH. SALEH

1321900017



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. SALEH
NBI/ NPM : 1321900017
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENGADILI SENGKETA PROSES DAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : Surabaya, 05 Januari 2022

Yang Menyatakan,



MOH. SALEH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia yang telah diberikan sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis Tesis yang berjudul :

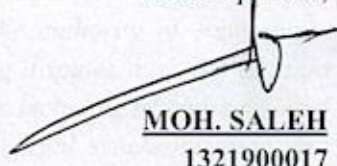
“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGADILI SENGKETA PROSES DAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF”

1. Bapak Prof. Dr. Mulyato Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H selaku pembimbing kedua dan Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya telah memberikan arahan dan bimbingan serta dorongan agar penulisan tesis lulus tepat waktu.
4. Bapak Dr. Hufron, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah rela mengikhhlaskan waktunya untuk memberikan binbingan, mengoreksi, arahan serta saran perbaikan untuk kebaikan penulisan tesis ini.
5. Kepada Almi ibu saya telah selalu memberikan motivasi dalam belajar serta kepada Bapak Muhammad (Alm) yang telah membesarkan saya sehingga menjadi seperti sekarang dan Sadaudara Perempuan Siti Rohmah dan Keluarganya;
6. Kholisatun, S.H istri tercinta saya yang terus memberikan dorongan untuk tetap semangat dalam mengajarkan tesis ini.
7. Kepada teman-teman Mahasiswa Magister Hukum angkatan 42 dan para tenaga pengajar utamanya Bapak Karmal Maksudi yang telah memberikan motivasi dalam pengerjaan tesis ini.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan mendatang.

Pamekasan, 10 Januari 2022

Hormat penulis,


MOH. SALEH

1321900017

The purpose of this study is to find a re-interpretation of the position of the judicial authority in the process of separating powers and administrative functions. This study uses a theoretical approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The study was carried out by approaching the position of the judicial authority in the process of separating powers and administrative functions in Indonesia, where the authority to administer the authority of the judiciary as described in Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which also contained the level of the position of the judicial authority in the administrative structure, which institutions have authority over it and in which it should be a main role organ because its authority is too large. The results of the research are that the position of the judicial authority in the administrative structure of the EPL organization in the Indonesian administrative structure as described in Article 24 (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while the authority to administer the administrative functions and administrative disputes over the election process is given to the institution of separation of powers (separation of power) because the authority to administer is the authority of the judicial institution as described in Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The separation of the Treasury of the State of Indonesia is carried out with the separation of separation of powers, which requires that a state institution only has one authority, not more than one authority.

Keywords: Administrative Authority to Administer the Election Process and Administrative Functions

ABSTRACT

The purpose of this study is to find an understanding of the position of Bawaslu in the Indonesian constitutional structure and to question the authority of Bawaslu in adjudicating administrative violations and adjudicating disputes over the election process. This type of research is normative legal research, including research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization and research on electoral history. This study uses several approaches, namely legislation (statute approach), conceptual approach in this case conducting an assessment of the authority of Bawaslu in adjudicating disputes over the election process and adjudicating administrative violations where the authority to adjudicate is the authority of the judiciary as described in Article 24 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, besides that it also examines the issue of the position of Bawaslu in the Indonesian constitutional structure, which institutionally is an auxiliary state organ but in practice it seems to be a main state organ because its authority is too large. The results of the research are that the position of Bawaslu is as an auxiliary state organ which is in the same position as the KPU organizers in the Indonesian constitutional structure as described in Article 22 E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while the authority of Bawaslu in adjudicating administrative violations and adjudicating disputes over the election process is contrary to the teaching of separation of powers (separation of power) because the authority to adjudicate is the authority of the judicial institution as described in Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in the perspective of the Theory of the State of Law it is not in accordance with the teaching of separation of powers, which requires that a state institution only has one authority, not more than one. authority.

Keywords : *Bawaslu, Authority to adjudicate, Disputes over the election process, and administrative violators*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu menemukan pemahaman kedudukan Bawaslu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta menyoal kewenangan Bawaslu dalam mengadili pelanggaran administratif dan mengadili sengketa proses Pemilu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan penelitian sejarah kepemiluan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dalam hal ini melakukan pengkajian terhadap kewenangan Bawaslu dalam mengadili sengketa proses Pemilu dan mengadili pelanggaran administratif dimana kewenangan mengadili merupakan kewenangan lembaga yudisial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUDN RI 1945, selain itu juga mengkaji persoalan kedudukan Bawaslu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang secara kelembagaan merupakan *auxiliary state organ* tetapi dalam praktiknya seolah menjadi lembaga *main state organ* karena wewenangnya terlalu besar. Hasil Penelitian kedudukan Bawaslu adalah sebagai lembaga *auxiliary state organ* yang secara kedudukan sama dengan penyelenggara KPU dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 E UUDN RI 1945, sedangkan untuk kewenangan Bawaslu dalam mengadili pelanggaran administratif dan mengadili sengketa proses Pemilu bertentangan dengan ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) karena kewenangan mengadili adalah kewenangan lembaga yudisial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUDN RI 1945, dalam perspektif Teori Negara Hukum tidak sesuai dengan ajaran pemisahan kekuasaan, yang mensyaratkan adanya lembaga negara hanya memiliki satu kewenangan tidak boleh lebih dari satu kewenangan.

Kata Kunci: Bawaslu, Kewenangan mengadili, Sengketa proses Pemilu, dan Pelanggaran administratif

DAFTAR ISI

TESIS	i
TESIS	ii
TESIS	iii
TESIS	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Orinalitas Penelitian	10
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu	10
1.5.2 Penelitian Terdahulu	21
BAB II	30
LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP.....	30
2.1 Landasan Teori.....	30
2.1.1 Teori Negara Hukum.....	30
2.1.2 Teori Trias Politika.....	38
2.1.3. <i>Separation of power</i> atau Pemisahan Kekuasaan.....	40
2.1.4. Teori <i>checks and Balance System</i>	42
2.2 Penjelasan Konsep.....	56

2.2.1	Teori Lembaga Negara.....	56
2.2.2	Konsep Peradilan Pemilu	61
2.2.3	Konsep Penyelesaian Sengketa Proses.....	62
2.2.4	Konsep penyelesaian Pelanggaran Administratif.....	65
BAB III	68
PEMBAHASAN	68
3.1.	Kedudukan Bawaslu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.....	68
3.1.1.	Lembaga Negara di Indonesia.....	68
3.1.2.	Lembaga Pemilu di Indonesia	70
3.1.3.	Kedudukan Bawaslu.....	81
3.1.4.	Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Bawaslu.....	89
3.2.	Kewenangan Bawaslu dalam Mengadili Sengketa Proses dan Pelanggaran Administratif	97
3.2.1.	Karakteristik Putusan Sengketa Proses dan Pelanggaran Administratif ...	97
3.2.2.	Kewenangan Bawaslu dalam Mengadili Sengketa Proses dan Pelanggaran Administratif.....	100
3.2.3.	Proses Beracara dalam Penyelesaian Sengketa Proses dan Pelanggaran Administratif	114
BAB IV	126
4.1.	Kesimpulan	126
4.2.	Saran.....	127
Daftar Pustaka		